



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RR.WORO HAPSARI DEWI
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 446242

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.045.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 86 m2/129 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 825.000.000		
2. Tanah Seluas 763 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 125.000.000		
3. Tanah Seluas 284 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	415.000.000
1. MOTOR, YAMAHA LEXY SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 93.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000		
4. MOBIL, MITSUBISHI MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	53.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.523.000.000
III. HUTANG	Rp.	760.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	763.000.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.